

PWI Jaya Berikan Kesempatan Pemutihan Kartu Anggota Biasa

JAKARTA (IM) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya memberikan kesempatan pemutihan keanggotaan PWI bagi anggota yang Kartu Tanda Anggota (KTA)-nya telah kadaluarsa lebih dari satu tahun.

“Salah satu butir keputusan Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PWI yang diikuti seluruh ketua PWI Provinsi se Indonesia di Ancol, Minggu (18/2) lalu, yaitu memberikan kesempatan kepada anggota biasa PWI yang KTA-nya sudah kadaluarsa lebih dari satu tahun diperkenankan untuk melakukan pengaktifan,” kata Plt Ketua PWI Jaya Kesit B Handoyo dalam siaran persnya, kemarin.

Kesit menambahkan, kesempatan untuk mengaktifkan KTA Biasa akan dibuka pada 1 Maret 2024 dan berakhir pada 31 Maret 2024.

“Hanya satu bulan waktunya. Setelah lewat batas itu tidak bisa lagi melakukan pengaktifan. Kami masih menunggu surat edaran resmi dari PWI Pusat,” kata Kesit.

Terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengaktifan KTA, Kesit menjelaskan, yang bersangkutan masih bekerja sebagai wartawan di media massa berbadan hukum pers, memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW), melampirkan foto copy KTA PWI, serta mengisi

formulir yang disediakan PWI Jaya.

“Selanjutnya seluruh berkas asli dikirim ke PWI Jaya di Gedung Bank DKI Lantai 9, Jl. Suryopranoto 8, Jakarta Pusat,” Kesit menerangkan.

Konferprov PWI Jaya

Sementara itu gelaran Konferensi Cabang Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta segera memasuki tahapan dikeluarkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari PWI Pusat. Masih ada beberapa fase menentukan lainnya menuju Konfercab PWI Jaya yang diagendakan Kamis, 25 April 2024.

Dikeluarkannya DPS sudah dinanti oleh insan pers ibu kota yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Biasa yang masih berlaku.

Panitia pelaksana Konfercab PWI Jaya merencanakan untuk merilis DPS secara terbuka kepada stakeholder, untuk mengurai kemungkinan adanya pemegang KTA yang belum masuk dalam daftar.

Fase perubahan DPS ke Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara 25 Februari hingga 25 Maret 2024.

Bersamaan dengan masa pembaruan KTA, dibuka pendaftaran Calon Ketua PWI Jaya 2024-2029 dan Calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), hingga 2 April 2024. ● yan

FOTO: ANT



KEMENDAG DORONG PEMANFAATAN TEKNOLOGI UNTUK UMKM

Penjual soto Sugiman menggoreng ayam dengan menggunakan perpaduan teknologi antara virtual reality (VR) dan augmented reality (AR) di Jakarta, Jumat (23/2). Kemendag terus mendorong pelaku UMKM adaptif dan sadar terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing di pasar lokal maupun global.

Banyak Tokoh Mulai Lirik Pilgub DKI, Nilai Jualnya Tinggi untuk Nyapres

Menjadi Gubernur DKI itu kan bergengsi, punya magnet tersendiri. Karena itu jabatan Gubernur DKI itu diperebutkan oleh banyak figur, maupun banyak tokoh. Karena bisa jadi batu loncatan untuk menjadi capres, kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.

2024 ini bukanlah sesuatu yang mengherankan.

Menurut Ujang, menjadi gubernur DKI akan menjadikan nilai tawar seorang pemimpin jadi lebih tinggi ketimbang kepala daerah lainnya.

Di mana dalam tiga Pilpres terakhir yakni 2014, 2019, 2024 selalu ada yang memiliki rekam jejak sebagai mantan gubernur dan mantan wakil gubernur DKI Jakarta. “DKI kan bergengsi, DKI punya magnet tersendiri, oleh

karena itu menjadi gubernur DKI itu diperebutkan oleh banyak figur, banyak tokoh. Karena gubernur DKI itu jadi batu loncatan untuk menjadi capres,” kata Ujang, Jumat (23/2).

Menjadikan posisi Gubernur DKI sebagai batu loncatan untuk menjadi capres dilakukan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo. Ia maju di Pilkada DKI 2012 lalu. Baru dua tahun menjabat Jokowi maju di Pilpres 2014 karena menjadi Gubernur DKI membuat elektabilitas Jokowi tinggi. Pada akhirnya Jokowi terpilih menjadi presiden dua periode.

Berikutnya pada 2019, giliran Sandiaga Uno yang saat itu menjabat wakil gu-

bernur DKI maju di Pilpres. Sandiaga maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Namun kala itu Prabowo-Sandi kalah.

Teranyar adalah Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tinggi karena menjabat Gubernur DKI selama lima tahun.

“Siapa pun yang punya kapasitas silakan bersaing untuk Pilkada DKI. Soal nanti kalah menang, warga Jakarta memilih atau tidak, itu urusan lain,” ucap Ujang.

Nama anyar yang memberi kode maju di Pilgub DKI adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Sebelum RK, ada nama Ahmad Sahroni, Erick Thohir dan Tri Rismaharini. ● yan

Dishub DKI Rutinkan Razia Pengendara Motor Lawan Arah

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan TNI merutinkan razia dan tilang terhadap pengendara motor yang melawan arah di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota.

“Pengawasan dan penindakan ini dimulai pada 22 Februari 2024 dan akan dilakukan seterusnya secara rutin sebanyak dua kali sehari pada pagi dan sore hari guna memastikan kelancaran dan ketertiban lalu lintas,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi di Jakarta, Jumat (23/2).

Razia berlangsung dari pukul 07.30-10.00 WIB dan pukul 16.00-18.00 WIB di beberapa lokasi di Jakarta.

Pada Kamis pagi kemarin, penindakan dilakukan di empat lokasi, yaitu Jalan Wahid Hasyim, Jalan Johar, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam dan Jalan Bora. Total kendaraan roda dua yang melawan arah dan ditindak sebanyak 30 kendaraan.

Sementara di sore hari, sebanyak 114 kendaraan yang melawan arah diberikan sanksi tilang oleh jajaran Kepolisian dengan lokasi sebagai berikut:

Jakarta Pusat (27 kendaraan); Jalan KH Mas Mansyur, Jalan Kramat Bunder, Jalan Gunung Sahari, Jalan Karang Anyar, Jalan Letjen Su-

prapto, Jalan Kebon Sirih Timur, Jalan Johar.

Jakarta Utara (7 kendaraan); Jalan Raya Cilincing

Jakarta Selatan (25 kendaraan); Taman Setia Budi, Jalan Rasuna Said, Jalan Kalibata Raya, Jalan Ciputat Raya.

Jakarta Barat (15 kendaraan); Ring Road Rawa Buaya, Ring Road Pintu Air Cengkareng.

Jakarta Timur (40 kendaraan); Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Jalan Raya Bekasi, Jalan layang (flyover), Pondok Kopi, Turunan jalan layang (flyover) Klender.

Pada razia di hari pertama, tercatat total sebanyak 144 kendaraan roda dua melakukan aksi lawan arah dan dilakukan penindakan.

“Guna menimbulkan efek jera, petugas menindak dengan menegakan BAP (tilang) pada para pengendara kendaraan roda dua tersebut,” ujar Syafrin.

Adapun pemilihan lokasi penindakan ini akan disesuaikan dengan potensi wilayah terjadinya pelanggaran lawan arah atau lawan arus.

Penindakan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas melalui kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas, petunjuk arah serta petugas lalu lintas guna terciptanya kelancaran, keamanan dan keselamatan di jalan. ● yan

Ada Pojok Buku di Stasiun Jakarta Kota-Bogor

JAKARTA (IM) - PT KAI Commuter (KCI) menyediakan pojok bacaan di stasiun agar penumpang kereta rel listrik (KRL) bisa sambil membaca buku di perjalanan. Buku bacaan itu diletakkan dengan apik dalam rak “Baca Buku di KRL” yang didesain oleh seniman Popomangun.

“Tugas kami menumbuhkan budaya minat baca di antara pelanggan Commuter Line bahwa ini budaya membaca bisa dinikmati oleh siapa

pun,” kata Direktur Utama PT KCI, Asdo Artriviyanto saat konferensi pers di Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Barat, Jumat (23/2).

Saat ini, rak buku itu baru tersedia di Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Bogor. Tersedianya pojok bacaan itu merupakan kolaborasi Gramedia, Popomangun, PT KAI, dan PT KCI. Saat ini, ada 300 buku fisik dari berbagai genre yang tersedia di rak.

Selain itu, masyarakat juga bisa memindai kode QR yang

tertera untuk mendapatkan akses gratis 500 buku dalam aplikasi Gramedia Digital selama satu hari. Masyarakat boleh mengambil buku itu, membaca di kereta, lalu mengembalikannya saat tiba di stasiun tujuan.

Dalam enam bulan ke depan, PT KCI berencana untuk menambah rak buku di delapan stasiun lain. “Dalam periode enam bulan, delapan stasiun terlebih dahulu. Nanti kami evaluasi,” ujar Asdo. ● yan

FOTO: ANTARA



TARGET PRODUKSI PERIKANAN 2024

Pekerja memindahkan ikan hasil tangkapan nelayan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Jumat (23/2). Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) menargetkan produksi perikanan mencapai 30,85 juta ton pada 2024.

Lift Prioritas Stasiun Manggarai Jadi Rebutan Penumpang

JAKARTA (IM) - Lift prioritas di Stasiun Manggarai, Jakarta, kini jadi sasaran rebutan penumpang KRL Commuterline yang akan berpindah peron sejak tangga eskalator peron 11-12 untuk penumpang tujuan Depok, Citayam, Nambodan Bogor, rusak.

Rabu petang lalu, 21 Februari 2024, tangga eskalator ini memicu insiden penumpang jatuh ketika posisi tangga yang tidak beroperasi digunakan seju-

lah penumpang untuk naik, namun tiba-tiba eskalator ini menyala dengan arah tangga turun.

Seperti terpancui di lokasi, para penumpang yang akan menuju peron 11-12, tampak berkumpul di depan lift prioritas yang diperuntukkan bagi disabilitas, lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

Petugas keamanan Stasiun juga terlihat berulang kali mengingatkan kepada penumpang, agar tidak meng-

gunakan lift prioritas karena hanya boleh digunakan oleh penumpang prioritas seperti lansia, ibu hamil atau penyandang disabilitas.

“Ini lift prioritas, yang masih merasa buger dan sehat, silakan naik tangga biasa,” teriak salah satu petugas kepada penumpang.

Selain lift prioritas, sejumlah penumpang memilih menggunakan tangga manual.

Seorang pengguna KRL Commuterline bernama

Damar (30), mengaku mengetahui adanya insiden penumpang jatuh saat menaiki tangga eskalator peron 11-12 yang berbalik arah, melalui media sosial.

Dia mengaku sempat menggunakan eskalator, sebelum adanya peristiwa tersebut.

“Padahal kemarin jam 5 sore, saya ke peron 11-12, masih aman aja,” kata dia kepada wartawan, Jumat (23/2).

Sebagai penumpang

yang telah lama menggunakan KRL Commuterline di Stasiun Manggarai, dia mengeluh kerepotan jika tangga eskalator tidak beroperasi.

Ini karena penumpang harus menaiki tangga biasa, setelah leleh seharian bekerja.

“Dengan tak beroperasi eskalator Peron 11-12, tentu merasa enggak nyaman ya, karena harus naik tangga biasa, dengan kondisi badan yang udah leleh seharian bekerja,” ujarnya. ● yan

Bawaslu DKI Terima Laporan Penyusutan dan Penggelembungan Suara Pemilu

JAKARTA (IM) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menerima laporan dugaan penyusutan dan penggelembungan suara Pemilu 2024 di Jakarta. Bawaslu mengaku bakal segera menindaklanjuti laporan itu demi azas jujur dan adil.

“Bersama rakyat, Bawaslu DKI mengawasi proses rekapitulasi tingkat PPK yang itu ada tiga laporan masuk kepada Bawaslu DKI,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/2).

Benny menuturkan ketiga laporan itu berasal dari calon anggota legislatif (caleg) DPRD DKI. Yakni Partai Gerindra dan Perindo terkait dugaan penyusutan perolehan suara di Sirekap.

Kemudian, tim hukum nasional DKI dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar terkait dugaan penggelembungan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Raka Buming Raka di Sirekap.

Bawaslu DKI menyatakan masih melakukan kajian awal dari ketiga laporan masuk dugaan pelanggaran terkait penyusutan dan penggelembungan suara itu.

“Bawaslu DKI mengimbau masyarakat agar melaporkan kepada Bawaslu jika mendapati dugaan pelanggaran selama proses rekapitulasi suara,” tegasnya.

Bawaslu DKI berkomitmen menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat dalam mengawasi kemurnian suara pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu

DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

“Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Benny Sabdo di Jakarta, Kamis (22/2).

Selain itu juga bisa dikenakan sanksi sesuai Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggota KPU Tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta. ● yan

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL DASAR PT. INFINITY PLUS SOLUTION

Direksi PT. INFINITY PLUS SOLUTION (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh kreditor perseroan bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diadakan pada tanggal 23 Januari 2024, Para Pemegang Saham telah menyetujui atas penurunan Modal Dasar dari semula sebesar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kepada Kreditor dan Debitor dari Perseroan yang keberatan atas penurunan modal tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan, selama 60 hari kerja sejak penandatanganan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dilakukan. Jakarta, 24 Februari 2024
Direksi
PT. INFINITY PLUS SOLUTION